

KETERGANTUNGAN BANTUAN SOSIAL DAN TANTANGAN KEMANDIRIAN EKONOMI MASYARAKAT KOTA SURABAYA

Nahara Zika Sharira¹, Meisya Luna Azahra²

^{1,2}Universitas Negeri Surabaya

Email : 25040674284@mhs.unesa.ac.id¹, 25040674283@mhs.unesa.ac.id²

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena ketergantungan bantuan sosial serta tantangan dalam mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat di Kota Surabaya. Latar belakang penelitian didasarkan pada masih tingginya angka kemiskinan yang bersifat multidimensional serta peran bantuan sosial sebagai instrumen kebijakan publik dalam melindungi masyarakat rentan. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi literatur melalui pemanfaatan data sekunder dari jurnal, artikel ilmiah, dan dokumen kebijakan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program bantuan sosial mampu membantu pemenuhan kebutuhan dasar dan menjaga stabilitas kesejahteraan masyarakat dalam jangka pendek. Namun, dalam implementasinya masih terdapat berbagai kendala, seperti ketidaktepatan sasaran, keterbatasan pengawasan, serta kurangnya integrasi dengan program pemberdayaan ekonomi. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketergantungan penerima manfaat yang berdampak pada rendahnya motivasi untuk bekerja dan berwirausaha. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih terintegrasi melalui peningkatan akurasi data, penguatan kinerja aparatur, serta pengembangan program pemberdayaan ek mi. Dengan demikian, bantuan sosial diharapkan tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga mampu mendorong kemandirian ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Bantuan Sosial, Kemiskinan, Kemandirian Ekonomi, Kebijakan Publik, Pemberdayaan Masyarakat.

Abstract

This study aims to analyze the phenomenon of dependency on social assistance and the challenges in achieving economic independence for the community in Surabaya. The background of the study is based on the persistently high multidimensional poverty rate and the role of social assistance as a public policy instrument in protecting vulnerable communities. The method used is a qualitative approach with a literature study through the utilization of secondary data from journals, scientific articles, and related policy documents. The results show that social assistance programs are able to help meet basic needs and maintain the stability of community welfare in the short term. However, in its implementation, various obstacles remain, such as inaccurate targeting, limited supervision, and a lack of integration with economic empowerment programs. These conditions have the potential to create dependency among beneficiaries, resulting in low motivation to work and become entrepreneurs. Therefore, a more integrated policy is needed through improving data accuracy, strengthening apparatus performance, and developing economic empowerment programs. Thus, social assistance is

expected to be not only consumptive, but also able to encourage sustainable economic independence for the community.

Keywords: *Social Assistance, Poverty, Economic Independence, Public Policy, Community Empowerment.*

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan permasalahan pembangunan yang bersifat multidimensional dan masih menjadi tantangan utama dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, khususnya SDG 1 (No Poverty). Pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan berbagai program bantuan sosial sebagai instrumen kebijakan ekonomi publik untuk melindungi masyarakat miskin dan rentan dari guncangan ekonomi serta menjaga stabilitas kesejahteraan sosial. Bantuan sosial diposisikan sebagai social safety net yang diharapkan mampu menurunkan tingkat kemiskinan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara bertahap (Nurahman et al., 2025).

Secara konseptual, bantuan sosial dirancang tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar jangka pendek, tetapi juga sebagai sarana transisi menuju kemandirian ekonomi. Namun, dalam praktiknya, efektivitas program bantuan sosial masih menghadapi berbagai tantangan implementasi, termasuk ketepatan sasaran, keterbatasan pengawasan, serta lemahnya

integrasi dengan program pemberdayaan ekonomi. Kondisi ini menyebabkan bantuan sosial lebih berorientasi pada aspek konsumtif dibandingkan aspek produktif, sehingga belum sepenuhnya mendorong perubahan struktural pada kondisi ekonomi masyarakat miskin (Siahaan et al., 2025).

Salah satu dampak yang mengemuka dari implementasi bantuan sosial adalah munculnya ketergantungan penerima manfaat terhadap bantuan pemerintah. Ketergantungan ini ditandai dengan menurunnya motivasi sebagian masyarakat miskin untuk mengembangkan sumber pendapatan mandiri karena adanya ekspektasi bahwa bantuan sosial akan terus diterima secara berkelanjutan. Bantuan sosial yang bersifat rutin dan tidak disertai mekanisme evaluasi kemandirian berpotensi membentuk pola pikir pasif di kalangan penerima manfaat, sehingga bantuan dipersepsikan sebagai sumber pendapatan tetap, bukan sebagai dukungan sementara. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan bantuan sosial belum sepenuhnya diarahkan pada penguatan

kapasitas ekonomi penerima manfaat, melainkan masih berfokus pada pemenuhan kebutuhan jangka pendek (Nurahman et al., 2025).

Ketergantungan terhadap bantuan sosial tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga memengaruhi perilaku dan orientasi sosial masyarakat miskin. Ketergantungan bantuan sosial dapat mengubah pola perilaku ekonomi penerima manfaat, seperti berkurangnya inisiatif bekerja, rendahnya dorongan untuk berwirausaha, serta minimnya upaya meningkatkan keterampilan produktif. Dampak tersebut berpotensi menghambat peningkatan kesejahteraan jangka panjang dan memperpanjang siklus kemiskinan apabila tidak diimbangi dengan kebijakan pemberdayaan yang terintegrasi. Oleh karena itu, bantuan sosial yang tidak disertai strategi transisi menuju kemandirian ekonomi berisiko menciptakan welfare dependency dan melemahkan tujuan utama kebijakan pengentasan kemiskinan (Wahyudi et al., 2026).

Fenomena tersebut mencerminkan adanya kesenjangan antara tujuan kebijakan dan realitas di lapangan. Pemerintah menargetkan bantuan sosial sebagai instrumen pengentasan kemiskinan yang berkelanjutan, namun implementasi di

tingkat lokal masih menghadapi berbagai kendala administratif dan kelembagaan. Kinerja aparatur pemerintah dalam penyaluran bantuan sosial menjadi faktor penting yang menentukan keberhasilan kebijakan, terutama dalam memastikan bantuan tepat sasaran dan berorientasi pada peningkatan kapasitas penerima manfaat (Ramadyna & Oktariyanda, 2025). Selain permasalahan implementasi birokrasi, bantuan sosial juga menghadapi tantangan dalam mendorong kemandirian ekonomi masyarakat miskin. Studi Sabarisman et al. (2024) menunjukkan bahwa kemandirian ekonomi lebih efektif tercapai ketika bantuan sosial dikombinasikan dengan pendekatan pemberdayaan, seperti kewirausahaan sosial dan penguatan jaringan sosial penerima manfaat. Tanpa strategi pemberdayaan yang terintegrasi, bantuan sosial berisiko mempertahankan status quo kemiskinan dan memperpanjang ketergantungan masyarakat terhadap intervensi pemerintah.

Ketergantungan bantuan sosial dapat dikategorikan sebagai public problem yang memerlukan intervensi kebijakan pemerintah secara serius. Masalah ini tidak hanya berdampak pada individu penerima manfaat, tetapi juga berimplikasi pada

efektivitas anggaran publik dan keberlanjutan kebijakan pengentasan kemiskinan. Jika tidak ditangani secara komprehensif, ketergantungan bantuan sosial berpotensi menghambat pencapaian SDG 1 dan melemahkan upaya pembangunan ekonomi inklusif (Nurahman et al., 2025). Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketergantungan bantuan sosial dan tantangan kemandirian ekonomi masyarakat miskin dalam perspektif kebijakan publik, dengan menelaah kesenjangan antara tujuan kebijakan dan implementasinya di lapangan, mengkaji dampak bantuan sosial terhadap perilaku ekonomi penerima manfaat, serta mengevaluasi formulasi dan implementasi kebijakan bantuan sosial dalam mendukung pencapaian pengentasan kemiskinan yang berkelanjutan sesuai dengan SDG 1 (No Poverty).

TINJAUAN PUSTAKA

Kajian mengenai ketergantungan bantuan sosial dan tantangan kemandirian ekonomi masyarakat miskin dapat dianalisis melalui perspektif teori kebijakan publik, khususnya teori implementasi kebijakan. Salah satu teori yang sering digunakan adalah teori implementasi kebijakan dari George C. Edward III yang menjelaskan

bahwa keberhasilan suatu kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap pelaksana, serta struktur birokrasi. Keempat faktor tersebut menentukan sejauh mana kebijakan dapat dilaksanakan secara efektif dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks program bantuan sosial, teori ini relevan untuk menjelaskan bagaimana proses penyaluran bantuan kepada masyarakat miskin dapat berjalan secara optimal apabila didukung oleh koordinasi yang baik antara pemerintah, aparat pelaksana, dan masyarakat penerima manfaat (Solissa et al., 2025).

Bantuan sosial merupakan instrumen kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat rentan, seperti melalui program bantuan langsung tunai atau Program Keluarga Harapan (PKH) yang membantu pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Namun dalam implementasinya, program bantuan sosial sering menghadapi tantangan berupa potensi ketergantungan penerima manfaat apabila tidak diimbangi dengan strategi pemberdayaan ekonomi (Sabarisman, Arifin, & Sulubere, 2024). Oleh karena itu, pendekatan

pemberdayaan seperti pengembangan kewirausahaan sosial dinilai penting karena tidak hanya memberikan bantuan finansial, tetapi juga pelatihan keterampilan, pendampingan usaha, serta penguatan jaringan sosial yang dapat mendorong masyarakat meningkatkan pendapatan dan mencapai kemandirian ekonomi secara berkelanjutan (Solissa et al., 2025).

Keberhasilan implementasi kebijakan bantuan sosial tidak hanya ditentukan oleh program pemberdayaan ekonomi, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kinerja aparatur pemerintah sebagai pelaksana kebijakan. Aparatur memiliki peran penting dalam memastikan penyaluran bantuan sosial dilakukan secara tepat sasaran, transparan, dan akuntabel sehingga berbagai permasalahan seperti kesalahan data penerima maupun keterlambatan distribusi dapat diminimalkan. Dalam perspektif ekonomi politik, kebijakan bantuan sosial juga dipandang sebagai strategi pemerintah dalam mengurangi kemiskinan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perlindungan sosial yang terintegrasi dengan upaya pemberdayaan ekonomi dan peningkatan partisipasi masyarakat, sehingga mampu mendorong kemandirian ekonomi secara berkelanjutan

(Ramadyna & Oktariyanda, 2025; Solissa et al., 2025).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (library research) yang bertujuan untuk menganalisis fenomena ketergantungan bantuan sosial serta tantangan dalam mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat, dengan memanfaatkan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber seperti jurnal ilmiah, artikel akademik, serta dokumen yang berkaitan dengan kebijakan bantuan sosial dan kemiskinan; data tersebut dikumpulkan melalui studi dokumentasi dengan cara mengidentifikasi, membaca, dan menelaah berbagai literatur yang relevan, kemudian dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif untuk menguraikan dan menafsirkan informasi dari berbagai sumber tersebut sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara implementasi kebijakan bantuan sosial, potensi munculnya ketergantungan penerima manfaat, serta tantangan dalam upaya mendorong kemandirian ekonomi masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Program Bantuan Sosial merupakan program yang pemberian bantuan dari Kementerian Sosial Republik Indonesia kepada KPM sebagai kompensasi seseorang yang tidak dapat menikmati segala macam pilihan dan kesempatan dalam pemenuhan kebutuhan dasarnya.

Kemiskinan adalah satu masalah yang dihadapi oleh seluruh negara, terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Hal ini dikarenakan kemiskinan bersifat multidimensional yang artinya kebutuhan manusia itu bermacam-macam. Secara konseptual, kemiskinan berasal dari permasalahan ekonomi dan sosial. Kemiskinan yang disebabkan oleh masalah ekonomi, yaitu kurangnya pendapatan dan jumlah kalori per individu. Sedangkan sebagai masalah sosial, yaitu sebagai keterbatasan individu untuk berpartisipasi dalam pembangunan karena kurangnya pendidikan, sehingga menyulitkan individu untuk mencapai tingkat kebahagiaan yang sama. Setiap permasalahan yang timbul memiliki beberapa faktor yang menyebabkan timbulnya kemiskinan menurut Hartono dan Aziz dalam Hudyana (2009):

- 1) Terbatasnya lapangan pekerjaan yang dapat memberikan konsekuensi

kemiskinan pada masyarakat yang memiliki keterbatasan modal dan keterampilan.

- 2) Pendidikan yang rendah, jika dimiliki seseorang dapat menyebabkan keterbatasan kemampuan untuk masuk kedalam dunia kerja.
- 3) Laju pertumbuhan penduduk. Meningkatnya jumlah penduduk akan memperburuk keadaan ekonomi terutama pada jumlah beban yang ditanggung tidak sebanding dengan penghasilan yang minim.
- 4) Kurangnya perhatian dari pemerintah, pemerintah yang kurang memperhatikan kondisi masyarakatnya tidak dapat memutuskan kebijakan yang mampu mengendalikan tingkat kemiskinan di negaranya.

Salah satu pendekatan yang relevan untuk mengatasi kelemahan dari kebijakan pengentasan kemiskinan adalah pendekatan ekonomi politik. Pentingnya pendekatan ekonomi politik bahwa pendekatan ekonomi politik dinilai mampu mengatasi kelemahan pendekatan dari segi ekonomi, pendekatan sosial dan kultural, serta pendekatan kemanusiaan

semata. Pendekatan ekonomi politik juga tidak hanya mengatasi kekurangan yang ada dalam ilmu ekonomi tetapi juga kelemahan-kelemahan dalam ilmu politik. Sementara politik biasanya kekurangan kerangka analisisnya untuk melihat fenomena ekonomi atau dasar institusi pasar. (Rachbini, 1994) Ekonomi politik melihat kemiskinan tidak hanya sebagai masalah ekonomi semata, tetapi juga sebagai hasil interaksi ekonomi dan politik, termasuk akses terhadap kekuasaan dan sumber daya. Sistem politik digunakan sebagai latar untuk menganalisis fenomena ekonomi yang terjadi dengan tujuan untuk menjelaskan berbagai tindakan ekonomi oleh aktor-aktor tertentu dalam aktivitas politiknya.

Salah satu aspek penting dalam menyikapi pengentasan kemiskinan tersebut tidak terputus dari peranan kebijakan oleh pemerintah. Peran kebijakan ekonomi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat ini berperan penting dalam menciptakan lingkungan yang mendukung kesejahteraan masyarakat dengan berbagai fungsi utama. Berikut beberapa peran kebijakan sosial dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat:

- a) Penyediaan jaminan sosial seperti program jaminan kesehatan, pensiun dan bantuan sosial memberikan

perlindungan bagi kelompok rentan, dan mengurangi ketidakpastian dan ketidaksetaraan.

- b) Akses pendidikan yang memadai. Program-program pendidikan seperti kebijakan pengembangan dan penguatan sistem penyediaan layanan dasar, peningkatan efektivitas program Bidik Misi, penataan asistensi sosial (Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, dan Kartu Keluarga Sejahtera), serta program perluasan cakupan kepeserataan jaminan sosial dan data kependudukan jaminan sosial. Program-program tersebut setidaknya dapat membantu akses pendidikan di Indonesia untuk masyarakat miskin.
- c) Peningkatan kesehatan masyarakat. Melalui fasilitas kesehatan dan program pencegahan penyakit, kualitas hidup meningkat sehingga masyarakat dapat berpartisipasi produktif dalam ekonomi dan sosial.
- d) Pemberdayaan masyarakat. Kebijakan yang mendukung pemberdayaan ekonomi, sosial, dan politik membantu masyarakat menjadi mandiri dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan.

- e) Pengurangan kemiskinan langsung. Kebijakan ini sudah diterapkan melalui program pemerintah yaitu Bantuan Langsung Tunai, subsidi pangan, dan bantuan perumahan memberikan dukungan nyata bagi keluarga miskin dan program-program jaminan sosial lainnya diharapkan mampu menurunkan angka kemiskinan.

Untuk memperkuat program-program pengentasan kemiskinan tersebut, pemerintah juga mendorong kebijakan kemiskinan terkait revolusi mental diantaranya melalui:

- 1) Redesign program yang memungkinkan perubahan mindset masyarakat miskin menjadi produktif, mandiri, dan bermartabat;
- 2) Mengaitkan program sosial yang mendorong masyarakat miskin peduli dengan kesehatan, pendidikan, dan keluarga berencana, serta;
- 3) Mempromosikan solidaritas sosial di masyarakat.

Perspektif masyarakat terhadap kebijakan pimpinan juga memberikan gambaran mengenai efektivitas kebijakan yang diterapkan dalam pelayanan publik. Beberapa warga penerima manfaat

menyatakan bahwa kebijakan pemasangan stiker Keluarga Miskin di rumah mereka mempermudah proses verifikasi data serta memastikan bahwa bantuan sosial diberikan kepada pihak yang berhak. Selain itu, masyarakat juga mengapresiasi kerja sama yang terjalin antara pegawai Kesra dalam menjalankan program ini, di mana mereka merasa bahwa layanan yang diberikan menjadi lebih sistematis dan transparan. Namun, dalam implementasi kebijakan ini, masih terdapat tantangan yang perlu diperhatikan. Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah akurasi data penerima bantuan. Meskipun sistem pendataan telah dilakukan secara sistematis melalui mekanisme verifikasi berlapis, masih ditemukan beberapa kasus di mana penerima bantuan tidak sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, evaluasi dan pembaruan data secara berkala sangat diperlukan untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan dapat berjalan lebih efektif. Penelitian yang dilakukan oleh Wibowo (2020) juga menemukan bahwa dalam program bantuan sosial, faktor validitas data menjadi salah satu tantangan utama dalam memastikan bahwa kebijakan yang dibuat dapat benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan penelitian diatas dan data pembahasan mengenai analisis ketergantungan bantuan sosial dan tantangan kemandirian ekonomi masyarakat kota Surabaya dapat menarik kesimpulan bahwa kemiskinan yang terjadi di Kota Surabaya adalah suatu masalah ekonomi dan sosial yang mempunyai keterbatasan individu dan pelayanan dasar. Instrumen penting dalam kebijakan publik untuk mengurangi kemiskinan dan melindungi masyarakat rentan di Kota Surabaya. Program ini terbukti mampu membantu pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat serta menjaga stabilitas kesejahteraan dalam jangka pendek. Dalam implementasinya masih terdapat berbagai kendala seperti ketidaktepatan sasaran pada bansos, keterbatasan pengawasan, serta kurang integrasi dengan program pemberdayaan ekonomi. Bantuan sosial yang bersifat rutin dan tidak disertai strategi pemberdayaan berpotensi menimbulkan ketergantungan pada masyarakat penerima manfaat, kondisi ini dapat menghambat terbentuknya kemandirian ekonomi karena menurunnya motivasi untuk bekerja, berwirausaha, dan meningkatkan keterampilan produktif. Oleh karena itu, diperlukan implementasi kebijakan terutama melalui penguatan

akurasi data, peningkatan kinerja aparatur, serta integrasi bantuan sosial dengan program pemberdayaan ekonomi seperti pelatihan keterampilan dan dukungan usaha. Bantuan sosial seharusnya tidak hanya berfungsi sebagai bantuan konsumtif ataupun jangka pendek, tetapi juga sebagai sarana transisi menuju kemandirian dapat tercapai secara lebih efektif dan sesuai dengan target pembangunan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Mawardi, R. A., & Pratama, M. R. (2023). Peran Social Enterprise sebagai Inovasi Pengentasan Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Studi Inovasi*, 3(1), 31–42.
<https://doi.org/10.52000/jsi.v3i1.130>
- Suleman, N. H., Parenrengi, F., & Kurniawan Oelfa, T. (2021). EKONOMI POLITIK INDONESIA SAAT INI, KEBIJAKAN, PENERAPAN SERTA TANGGAPAN MASYARAKAT KECAMATAN SINGKIL KOTA MANADO. In *Journal of Islamic Economics Law* (Vol. 1, Issue 1).
<http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/JI>
- Faisal fadillah, Hendra Gunawan, 2 Desember 2020, Mengkaji Konsep

Kemiskinan Melalui Pendekatan
Ekonomi Politik, Journal of
Government and Politics (JGOP), Vol.
4, Hal 133-154.